

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kelestarian lingkungan di Indonesia sudah menjadi kebijakan pemerintah pada setiap periode pemerintahan. Pada Pelita ketujuh melalui TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan “Kebijakan sektor Lingkungan Hidup, antara lain, mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN, 1998).

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sejak tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) telah mengadakan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan tujuan meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup.

Besarnya dampak *externalities* terhadap kehidupan masyarakat, mengakibatkan masyarakat menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif, *external diseconomy* atau *social cost* yang ditimbulkannya tidak semakin besar. Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan dengan pihak ketiga, dengan adanya tuntutan ini maka akuntansi bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak ketiga, tetapi juga dengan lingkungannya. Hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat *non-reciprocal* artinya transaksi itu tidak menimbulkan prestasi timbal-balik dari pihak yang berhubungan. Ilmu akuntansi yang mencatat, mengukur, melaporkan *externalities* ini disebut *Socio Economic Accounting (SEA)*. Istilah lain bisa juga dipakai misalnya *Environmental Accounting*, *Social Responsibility Accounting*, dan lain sebagainya (Harahap, 1993:347).

Menurut Junus (dalam Astuti & Ichsan, 2002) Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*) didefinisikan sebagai identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stockholders* perusahaan. Banyak perusahaan industri dan jasa besar dunia yang kini menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk

menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Tony Djogo, dalam Almilia 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun suatu standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 dan 33. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusahaan Hutan untuk melaporkan *item-item* lingkungannya dalam laporan keuangan. Guna menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, Standar Akuntansi Keuangan telah mengatur pelaporan komponen tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dalam laporan keuangan tahunan dalam PSAK No. 32 dan No. 33.

Kinerja ekonomi atau *economic performance* diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Dengan melihat kinerja ekonomi yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan tepat, banyak sekali teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan dipakai oleh kalangan pemilik modal maupun para manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, pada era perekonomian pasar yang seperti sekarang yang menuntut terwujudnya kondisi *good economic performance*, tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya memfokuskan pada terciptanya keuntungan yang besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai dengan perilaku kinerja ekonomi yang bersifat etis. Tuntutan *economic performance* etis,

berimplikasi pada perwujudan aktivitas industri sebagai interaksi harmonis antara *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan) dengan *shareholders* atau para pelaku bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, semua tindakan bisnis dan *economic performance* akan menjadi penilaian para *stakeholders* (Wulandari & Hidayah, 2013).

Untuk menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, Standar Akuntansi Keuangan telah mengatur pelaporan komponen tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (*environmental disclosure*) dalam laporan keuangan tahunan yang diatur oleh Bapepam. Dengan melihat *environmental disclosure* ini, dapat diketahui perusahaan mana saja yang telah menerapkan tanggung jawab sosialnya (Wulandari & Hidayah, 2013).

Ingram dan Frezier (1980) dalam Luciana Spica Almilia (2007) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan antara *environmental disclosure* dengan *environmental performance*, namun penelitian ini menyatakan bahwa *environment disclosure* berpengaruh signifikan pada *economic performance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari & Hidayah (2013) yang menyatakan bahwa *environmental disclosure* berpengaruh positif terhadap *economic performance*. Widarto & Mudjiyati (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa *environmental disclosure* dan *environmental performance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel *economic performance*.

Pengukuran *environmental disclosure* saat ini tidak memiliki standar yang baku mengenai item-item pengungkapan lingkungan. Namun, beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi pengungkapan lingkungan, antara lain Dewan

Ekonomi dan Sosial - Perserikatan Bangsa-Bangsa (*ECOSOC-PBB*), *Ernst and Ernst*, *Institute of Chartered Accountant in England and Wales (ICAEW)* dan *Global Reporting Initiative (GRI)* (Utomo, dalam Almilia 2007). Pada penelitian ini, digunakan indikator *GRI G-4* terbaru yang diterbitkan pada 2013. Pada pedoman ini, terdapat 34 indikator pengungkapan aspek lingkungan yang dijadikan acuan penilaian. Variabel *economic performance* dinilai menggunakan rasio ROE, dimana Sugiono (2008) menyatakan bahwa ROE adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian bisnis secara keseluruhan.

Berpijak dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali '**Pengaruh *Environmental Disclosure* Terhadap *Economic Performance* Pada Perseroan Terbatas yang Terdaftar di Indonesia**'.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
2. Bagaimana pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Bagaimana pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas yang terdaftar di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh *Environmental Disclosure* terhadap *Economic Performance* pada Perseroan Terbatas yang terdaftar di Indonesia sebagai bahan penulisan skripsi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk menguji pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas non-BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk menguji pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas yang terdaftar di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian sebelumnya maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh *environmental disclosure* terhadap *economic performance* pada Perseroan Terbatas di Indonesia.

2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang akuntansi lingkungan dan sosial serta *corporate sustainable management*.
3. Bagi pemerintah sebagai dasar penetapan berbagai kebijakan standar pengelolaan lingkungan dan pengungkapannya yang harus dipatuhi oleh perusahaan.
4. Bagi perusahaan, sebagai pengingat tentang pentingnya pertanggungjawaban perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan *sustainability report* dan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi *stimulus* yang secara proaktif berperan sebagai pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan.

